

## POTRET IKLIM USAHA PEMBERDAYAAN UMKM

Saudin Sijabat \*)

### Abstrak

*Iklim Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari dua unsur yaitu, UMKM dan Pemerintah. Pertama; UMKM diakui pernah berperan sebagai katup pengaman pada masa resesi ekonomi yang lalu dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pemerataan pembangunan, baik antar sektor, antar golongan maupun antar daerah karena usaha-usaha UMKM berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal. Namun UMKM masih dihadapkan pada berbagai masalah, misalnya; a) Rendahnya produktivitas UMKM; b) Tebatasnya akses UMKM kepada sumber produktif, seperti permodalan, teknologi, pasar dan informasi; dan c) Tidak kondusifnya iklim usaha bagi UMKM. Kedua; Pemerintah semakin menyadari akan peran UMKM dalam ketahanan perekonomian nasional. Menetapkan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam RPJM tahun 2005-2009. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menindaklanjuti dalam RTJM 2005-2009 koperasi dan UKM dengan program nyata, seperti antara lain; a) penyerderhanaan perizinan dan pengembangan system perizinan satu atap; b) Penilaian Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UMKM; dan c) Penataan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.*

*Iklim Usaha, Peraturan, Perizinan, Permodalan,  
Teknologi, Pemasaran*

### I. Pendahuluan

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama era reformasi mengindikasikan adanya keberpihakan untuk mempercepat proses pemberdayaan UMKM. Keberpihakan pemerintah yang telah ditetapkan menyangkut menyediakan modal material, intelektual dan institusional, tetapi untuk mengimplementasikan komitmen tersebut lagi-lagi terlihat adanya faktor hambatan yang tidak mudah ditembus hanya dengan kebijakan pihak eksekutif. Kebijakan tersebut sebagian sudah diimplementasikan dalam berbagai program-program terobosan yang dilaksanakan oleh beberapa Departemen dan Lembaga

---

\*) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM

pemerintah, antara lain; 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) binaan Departemen Sosial, 2) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), lebih dikenal dengan nama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), binaan Departemen Pekerjaan Umum, 3) Proyek Pemberdayaan Kecamatan (PPK), binaan Departemen Dalam Negeri, 4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), binaan BKKBN, 5) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), binaan Departemen Pertanian, 6) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), binaan Departemen Kelautan dan Perikanan. dan 7) Program Perkuatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi UKM. Tetapi program-program tersebut juga belum sepenuhnya mampu mendorong percepatan pemberdayaan UMKM. Kondisi yang demikian dapat dilihat dari berbagai aspek usaha UMKM, antara lain dalam bentuk kontradiksi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU nomor 3 tahun 2004 tentang Perbankan.

Adanya fenomena seperti diuraikan di atas dapat disimpulkan sementara, bahwa upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan UMKM selama era reformasi juga terlihat sudah cukup banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat (akselerasi) proses pemberdayaan koperasi dan UKM. Disinilah mungkin letak pokok permasalahannya. Kalangan UMKM serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok masyarakat banyak tersebut. Belum efektifnya isu-isu politik yang berkembang selama era reformasi mengindikasikan bahwa proses komunikasi politik sendiri belum berjalan baik. Sesungguhnya komunikasi politik yang efektif diharapkan dapat dibangun dan ditumbuhkan oleh para eksponen yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM. Dengan kondisi yang masih seperti sekarang jangan diharapkan akan ada tenggang rasa dari para pengusaha besar kepada pengusaha kecil. Belajar dari pengalaman masa lalu untuk bermitra antara pengusaha kecil dan pengusaha besar harus dipaksa dan diikat dengan peraturan formal, begitupun belum dapat berjalan dengan efektif

Data Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan bersama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2007) menyebutkan bahwa sumbangan Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2006 mencapai 53,54%. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa perubahan fokus pembinaan UMKM melalui aplikasi berbagai program pemberdayaan UMKM, relatif telah mampu mempertahankan posisi dan kualitas UMKM dalam dinamika perekonomian nasional, walaupun selama lima tahun terakhir, sektor riil yang dimotori usaha

besar mulai nampak menggeliat. Demikian juga dari aspek penyerapan tenaga kerja dilaporkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2006 UMKM mampu menampung tenaga kerja sebanyak 83.233.793 orang atau 96,28 % dari jumlah tenaga kerja yang ada dalam dunia usaha di Indonesia.

Di satu sisi, data statistik di atas membuktikan bahwa UMKM memiliki peran riil dan penting dalam kehidupan perekonomian nasional. Sumbangan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama didukung oleh kemampuan kelompok ini dalam memanfaatkan tenaga kerja melalui dinamika usahanya. Namun di sisi yang lain, permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM sampai sekarang ini semakin pelik dan bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan terlihat seakan-akan masih berjalan di tempat. Semua masalah tersebut mewarnai iklim usaha pemberdayaan UMKM, sehingga UMKM sulit untuk membangun akses kepada permodalan, pengembangan sistem produksi, pengembangan kualitas SDM, pengembangan teknologi, pengembangan pasar dan pengembangan sistem informasi.

Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (*multies years*). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu rezim pemerintahan. Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM. Seberapa jauh keberhasilan membangun sistem pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari seberapa besar angka pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan usahanya seperti diperlihatkan pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Pertumbuhan Dan Kinerja UMKM**

Aspek pengamatan	2002	2004	2006
Jumlah UMKM (unit)	45.100.285	46.221.794	48.929.925
Rata Modal (Rp)	7.325.432	9.673.200	10.869.543
Rata-rata Omset (Rp)	89.228.732	109.294.400	121.543.289
Rata-rata Laba (Rp)	11.286.321	14.359.231	15.735.290
Tenaga kerja (orang)	4,21	3,98	4,03

Sumber : Diolah dari *Statistik Usaha Kecil Dan Menengah. Kementerian Negara Koperasi dan UKM Jakarta 2007*

## II. Potret Iklim Usaha UMKM

Gambaran kondisi iklim usaha UMKM pada saat ini dapat dilihat dari pemberdayaan UMKM dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, dan sektor ke sektor. Pemberdayaan UMKM memang sudah menjadi komitmen nasional dalam rangka mewujudkan keadilan di bidang ekonomi, karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pemerataan pembangunan baik antar sektor, antar golongan maupun antar daerah. Usaha-usaha UMKM yang berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya nasional, tetapi untuk menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan pada banyak masalah antara lain: a) Rendahnya Produktifitas UMKM dan Koperasi yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMKM dengan Usaha besar; b) Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, pasar dan informasi; c) Tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh UMKM sehingga terjadi marjinalisasi dari kelompok ini.

Ketiga permasalahan tersebut pada hakekatnya tergantung pada kebijakan makro ekonomi yang merupakan derivasi dari sistem perekonomian yang selama lebih dari empat puluh tahun mendewakan pertumbuhan yang dimotori oleh kelompok usaha besar. Pemikiran Adam Smith yang mengilhami pengikut-pengikutnya dan kemudian dimordernisir oleh Shcumpeter (1934) ternyata masih menjadi phobia bagi sebagian besar negara berkembang (termasuk Indonesia) dalam merancang sistem perekonomiannya. Kepercayaan yang berlebihan pada paham ekonomi neoklasik yang sekarang telah berubah menjadi ultraneoklasik tidak saja telah melahirkan konglomerasi, tetapi juga telah

membangun situasi perekonomian yang diwarnai berbagai ketimpangan yang terindikasi dari sangat tidak wajarnya rasio antara rata-rata pendapatan perkapita dengan angka kemiskinan. Dampak antara dari kedua kondisi tersebut adalah iklim usaha UMKM yang tidak mudah untuk dapat dielemisir oleh kalangan UMKM sendiri. Akibatnya usaha UMKM tidak pernah mencapai titik marginal produktifitas. Dengan perkataan lain produktifitas UMKM selalu berada di bawah nilai harapan produktifitas yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Tidak kondusifnya iklim usaha UMKM yang mempengaruhi produktifitas UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek kegiatan usaha UMKM sebagai berikut:

### **2.1. Kesulitan Dalam Mendapatkan Perizinan**

Masalah legalitas usaha UMKM adalah salah satu faktor penyumbang terbesar dalam tidak kondusifnya iklim berusaha sekarang ini. Sujadi (2005) juga mengatakan hal yang sama bahwa salah satu kendala yang sangat sering dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan untuk mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya. Kendala ini telah dicoba diatasi dengan membangun sistem pelayanan satu atap, tetapi efektifitas dari program tersebut juga masih terbentur pada masalah koordinasi antar komponen sistem yang ada di dalamnya. Koordinasi memang sulit dibangun dalam sistem tersebut karena masing-masing unsur dalam sistem memiliki visi dan komitmen yang berbeda.

Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa sesungguhnya permasalahan dalam membangun sistem perijinan untuk UMKM adalah sangatlah rumit (kompleks). Masalah ini tidak bisa diselesaikan melalui suatu kebijakan yang dirancang hanya berdasarkan hasil pengamatan visual. Kebijakan yang bersifat parsial tersebut hanya akan memperbaiki atau menambah hal-hal yang dianggap kurang; tetapi tidak menyentuh akar permasalahannya. Permasalahan semakin beragam dengan diberlakukannya otonomi daerah. Tidak semua Daerah memiliki komitmen yang sama dalam memberdayakan UMKM. Peraturan peraturan Daerah adakalanya tidak sejalan dengan keinginan memberdayakan UMKM terutama yang berkaitan dengan sektor informal. Oleh sebab itu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas diperlukan adanya kebijakan yang dirancang berdasarkan pada hasil kajian yang komprehensif baik dari aspek substansi permasalahan maupun kedaerahannya.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kondisi ini adalah:

**1) Rendahnya kualitas SDM UMKM**

Dari hasil pengamatan di Kabupaten Tasik Malaya (Suharyadi 2004), menginformasikan bahwa rata-rata pengalaman kelompok usaha kecil dan usaha mikro di bidang usaha yang ditekuninya relatif cukup baik, tetapi dari aspek pendidikan, rata-rata pendidikan usaha mikro hanya setingkat Sekolah dasar sedangkan usaha kecil hanya setingkat SLP. Sejalan dengan itu pengetahuan tentang prosedur birokrasi dan manajemen usaha relatif rendah.

**2) Komitmen Pemerintah dan Birokrasi**

Nasution (2005) mengemukakan bahwa walaupun UMKM memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan usaha besar terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan modal, penyerapan tenaga kerja, dan penggunaan bahan baku lokal, tetapi kondisi nyata (real conditions) memperlihatkan perkembangan UMKM masih terkendala oleh berbagai masalah klasik yang bersifat struktural. Bukan hanya dari aspek kebijakan makro (kebijakan moneter dan fiskal), tetapi juga timbul dari sistem Ketatanegaraan dan Birokrasi yang belum kondusif, atau jelasnya kurang berpihak kepada UMKM. Contoh dari kondisi tersebut adalah masih banyaknya peraturan untuk UMKM, serta terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kesulitan UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, seperti dalam hal perizinan.

Sebagai informasi tambahan, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea dan di negara-negara Skandinavia tidak diperlukan perizinan sama sekali untuk UMKM. Sejalan dengan permasalahan di atas dapat disimpulkan adanya beberapa hal yang berhubungan dengan proses formalisasi UMKM yaitu: a) Kondisi faktor internal dan kriteria UMKM; b) Visi dan Komitmen birokrasi pelaksana proses; c) Batasan-batasan formalitas UMKM serta; d) Rangkaian dan pendekatan dalam penetapan prosedur formalisasi UMKM.

**3) Kurangnya penyuluhan**

Kelemahan sistem pembinaan di bidang penyuluhan dengan alasan klasik biasanya dinyatakan sebagai belum berperannya sistem koordinasi di antara instansi-instansi pembina baik antara pusat dengan daerah maupun antar instansi di daerah. Tetapi dengan mengingat bahwa dalam era otonomi daerah sekarang ini semua instansi pembina di daerah berada dalam satu atap yaitu pemerintah, dengan demikian yang menjadi pertanyaan di sini

adalah “seberapa jauh dan seberapa besar sebenarnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan instansi instansi yang ada di bawahnya” ?. Ketidak mampuan ini juga dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah karena mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM atau kinerja manajemen dari Pemerintah daerah yang belum optimal.

## 2.2 Kesulitan UMKM untuk mengembangkan permodalan

Seperti diperlihatkan pada tabel 2, rata-rata pemilikan modal usaha kecil dan usaha mikro dari tahun ketahun pada indeks harga tetap tidak banyak berubah, walaupun ada kecenderungan sedikit meningkat tetapi hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya inflasi. Kondisi yang demikian nampaknya sangat wajar karena pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro dan pengusaha kecil belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, maka kecil sekali peluang bagi kelompok ini untuk menambah permodalan atau meningkatkan investasinya.

**Tabel 2. Aset dan Modal UKM**

No	Tahun	Rata-rata Aset UK (Rpjt)	Rata-rata Modal UK (Rpjta)
1	2002	8,48	5,28
2	2003	11,41	5,86
3	2004	14,83	7,04
4	2005	15,05	7,82
5	2006	20,30	10,45
	Jumlah	70,07	36,45
	Rataan	14,413	7,290

Sumber: *Data Statistik Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Koperasi dan UKM Jakarta 2007 (dilolah)*

Berbeda dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil, pemilikan modal pengusaha menengah selama lima tahun terakhir terus meningkat. Namun peningkatan permodalan ini juga nampaknya dipengaruhi oleh kucuran dana pinjaman dari perbankan yang dimungkinkan karena berkembangnya usaha mereka sebagai dampak dari bertambahnya kegiatan-kegiatan di sektor pemerintahan. Demikian juga ada kecenderungan bahwa sebagian kelompok usaha menengah mampu membangun kemitraaan dengan

kelompok usaha besar. Di sisi lain terlihat bahwa program-program perkreditan yang bersumber dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan permodalan kelompok usaha mikro dan usaha kecil.

Kasus rendahnya kemampuan pemupukan modal oleh kalangan pengusaha mikro dan pengusaha kecil menurut Young Chulkim (1984) dapat disebabkan karena mereka sudah terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (*The vicious circle of Poverty*). Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain.

Kim (1984) lebih lanjut mengatakan bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk melaksanakan perkuatan di bidang permodalan. Belum terlihatnya pengaruh nyata dari intervensi pemerintah tersebut diduga dikarenakan sangat kecilnya dana-dana pemerintah yang disalurkan dibandingkan dengan besarnya jumlah UMKM yang membutuhkannya.

### **2.3. Kesulitan Dalam Mengembangkan Teknologi**

Pengembangan teknologi UMKM dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kemampuan SDM untuk mengembangkan teknologi, ketersediaan modal untuk pengadaan teknologi, peranan lembaga-lembaga penelitian dalam mendukung pengembangan teknologi serta kebijakan moneter dan fiskal.

Dari aspek pengembangan teknologi dan inovasi di bidang produksi kelompok usaha mikro dan usaha kecil selama dua dekade terakhir juga tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Rendahnya tingkat pengembangan teknologi nampaknya berkorelasi dengan kemampuan dalam mengembangkan pasar dan membangun jaringan usaha. Berbeda dengan kondisi usaha mikro dan usaha kecil, tingkat pendidikan kelompok usaha menengah lebih tinggi yaitu mencapai rata-rata indeks 4,35 atau setingkat Sarjana muda. Dalam hal pengalaman kelompok usaha menengah juga relatif masih lebih baik dengan rata-rata pengalaman di bidang usaha yang ditekuninya mencapai 8,4 tahun. Kurangnya pengalaman dari kelompok usaha mikro dan usaha kecil menurut Suharyadi (2004) disebabkan sebagian besar usaha yang dilaksanakan oleh kelompok ini sudah beralih dari sektor pertanian ke sektor industri kerajinan baru, seperti industri pakaian dan sepatu yang merupakan kegiatan baru di daerah

tersebut. Aspek pengalaman tidak banyak pengaruhnya terhadap produksi tetapi berpengaruh nyata terhadap kemampuan mengakses pasar dan inovasi teknologi, termasuk modifikasi produk yang berorientasi pada permintaan pasar. Lebih lanjut Suharyadi (2004) mengatakan bahwa aspek pendidikan formal tidak berpengaruh nyata (*significant*) terhadap keberhasilan usaha, maupun dalam meningkatkan pendapatan kelompok UMKM.

Rendahnya pengetahuan kelompok usaha mikro dan usaha kecil terhadap inovasi teknologi di bidang usaha yang ditekuninya tidak terlepas dari beberapa hal yaitu: a) kurangnya informasi dan ; b) rendahnya minat untuk melakukan terobosan teknologi karena rendahnya tingkat pendapatan mereka. Masalah ini semua bermula pada belum berfungsinya sistem kelembagaan pengembangan usaha untuk para pengusaha kecil dan pengusaha mikro tersebut. Ketiadaan lembaga yang berperan dalam pembinaan usaha mikro dan kecil ini juga tidak terlepas dari sistem pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### **2.4. Kesulitan Dalam Pemasaran**

Kekhawatiran sementara kalangan (terutama para penganut paham ekonomi pasar) terhadap kemampuan UMKM dalam menghadapi era globalisasi yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas, memang cukup beralasan jika menilai kemampuan UMKM hanya dari aspek efisiensi. Sesungguhnya bila diamati secara lebih cermat, efisiensi merupakan unsur penting dalam mengembangkan kemampuan pemasaran, walaupun banyak unsur lainnya yang lebih dominan baik berupa kemampuan komparatif UMKM dalam pasar yang dibangun dari sifat alami UMKM, maupun dari sifat pasar yang dalam era globalisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengembangkan informasi.

Kesulitan UMKM dalam membangun akses pasar lebih disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang belum dapat dieleminasi terutama yang berkaitan dengan informasi. Tetapi kendala tersebut bukanlah harga mati, karena banyak variabel-variabel pemasaran produk UMKM yang dapat diandalkan seperti rendahnya harga jual produk UMKM yang menjadi daya tarik bagi sebagian kalangan di pasar internasional. Rendahnya eksistensi UMKM dalam penguasaan pasar memang lebih terlihat sebagai dampak dari kondisi pasar yang tidak kondusif, namun sesungguhnya kondisi pasar yang demikian merupakan indikator dari adanya masalah pokok yang tidak terlihat secara nyata, yaitu sistem pemasaran yang

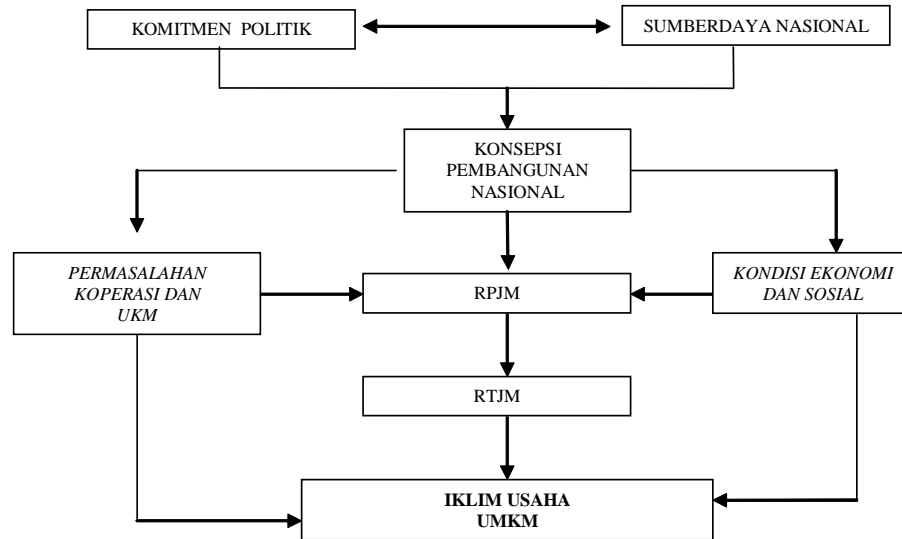
dikuasai oleh komponen sistem yang lebih kuat, sehingga UMKM selalu hanya berperan sebagai *Price Taker* (penerima harga). Dengan mengembangkan kemampuan menangkap informasi, maka diharapkan dominasi komponen lainnya (para pedagang besar dan eksportir) yang memiliki *bargaining* lebih kuat, yang selama ini berperan sebagai *price maker* (pembuat harga) akan dapat dipatahkan. Untuk kemudian pemerintah diharapkan akan memicu dengan dukungan atau bantuan perkuatan untuk meningkatkan kapasitas proses perubahannya.

Persaingan pasar yang semakin terbuka lebih didasarkan pada prinsip efisiensi dan pelayanan produk secara prima. Dalam kondisi ini semua pelaku usaha dituntut harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku bisnis yang terjadi, bila tidak ingin tergilas atau lenyap sama sekali dalam pertarungan pasar. Kondisi ini menuntut UMKM juga harus mempunyai informasi tentang kecenderungan pasar sehingga dalam menentukan jenis barang, kualitas, kuantitas dan sifat-sifat spesifik barang yang akan diproduksi. UMKM sebagai produsen hendaknya, tidak hanya terikat ketersediaan bahan baku dan SDM, tetapi harus juga memasukan unsur permintaan pasar dalam kalkulasi perencanaannya.

### III. Upaya Perbaikan Iklim Usaha UMKM

Masalah tidak kondusifnya iklim usaha UMKM merupakan dampak dari adanya berbagai masalah baik sektoral maupun fungsional yang saling berkaitan. Untuk mengetahuinya harus diuraikan secara sistematis dan komprehensif. Dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik yang bersifat sektoral melalui instansi yang berwenang, maupun melalui pendekatan kedaerahan. Dalam tiga tahun terakhir telah dilaksanakan 39 jenis program dengan anggaran lebih kurang Rp 42 Trililiun yang dilakukan oleh 11 Instansi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil. Berbeda dengan instansi sektoral yang melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM sebagai program tujuan ikutan untuk mencapai tujuan pokoknya yang bersifat sektoral, program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM langsung diarahkan pada tujuan program tersebut, yaitu memperkuat kondisi dan posisi UMKM dalam sistem perekonomian, sehingga dinamakan program perkuatan UMKM. Dalam tiga tahun anggran 2004 - 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah melaksanakan 16 jenis program pemberdayaan dan menyalurkan dana bantuan perkuatan untuk UMKM sebesar Rp 2,35 triliun (5,7% dari anggaran pemberdayaan UMKM).

**Secara skematis komitmen pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM dapat digambarkan seperti pada bagan 1.**



**Bagan 1 : Komitmen Pembangunan Nasional dan Iklim Usaha UMKM**

Pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan melalui: a) revitalisasi Peran Koperasi dan Perkuatan posisi UMKM dalam Sistem perkonomian nasional dan b) revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan: 1) Memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar; 2) Memperbaiki iklim usaha, dengan cara: a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan; b) Mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Untuk tujuan tersebut Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota, telah melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang difokuskan pada:

### **1. Perijinan UMKM**

Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan Penataan serta penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Saat ini bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang UMKM yang baru. Dan salah satu tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

## 2. Peningkatan Permodalan

Peningkatan permodalan UMKM yang sudah dilakukan Pemerintah antara lain; melalui program pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk UMKM dan Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Hasil kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tahun 2006 di Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi selatan memperlihatkan bahwa pada umumnya penerima bantuan perkuatan adalah mereka yang sudah berusaha di suatu bidang usaha atau berpengalaman rata-rata 2-3 tahun. Sebagian besar (68%) tidak memiliki modal sendiri, tetapi menggunakan modal pinjaman dari pihak lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dilaksanakan cukup menguntungkan dengan margin rata-rata 62,1% dari modal per tahun.

Oleh karena bantuan perkuatan yang diterima jumlahnya relatif kecil (rata-rata Rp 1,94 juta), dana tersebut baru cukup untuk menghilangkan (mensubstitusi) ketergantungan pada sumber permodalan lain (sebagian dari rentenir). Namun demikian, dengan adanya bantuan perkuatan sebesar Rp 1,94 juta, Omset UMKM meningkat dari rata-rata Rp 44,429 juta, menjadi Rp 53,489 juta, atau rata-rata bertambah sebesar Rp 9,059 juta (20,91%); Demikian juga laba UKM meningkat dari rata-rata Rp 10,495 juta, menjadi Rp 13,436 juta per tahun, atau bertambah sebesar Rp 2.941 juta (27,68%).

Menyikapi masalah permodalan yang dialami UMKM, seperti diuraikan di atas dan terlihat pada tabel. 2, maka Pemerintah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil, tanpa agunan tambahan dengan plafon kredit Rp. 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR ini karena kreditnya dijamin oleh pemerintah melalui P.T. Asuransi Kredit Indonesia dan Perum Sarana Pengembangan Usaha

Program KUR ini didukung enam Bank Umum (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin). Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank yang paling agresif menyalurkan KUR, hingga 28 April 2008 telah menyalurkan KUR sebesar Rp. 2,61 triliun kepada 394.708 debitur dan membuat porsi kredit UMKM BRI meningkat menjadi 83,13 persen, dengan nominal Rp. 98,46 triliun. BNI hingga 24 April 2008 telah menyalurkan KUR senilai Rp. 665 miliar, kepada 5.927 debitur. Sedangkan Bank Mandiri sampai dengan 21 April 2008 telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp. 864,74 miliar, dengan total debitur 24.100 yang terdiri dari 1.174 debitur individual dan 22.926 debitur linkage program.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Porsi Kredit UMKM Membesar, *Harian Kompas*, 30 April 2008

### 3. Pengembangan Teknologi Produksi

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM, perlu dilakukan upaya transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktivitas. Untuk itu peran teknologi sangat dominan karena berpengaruh langsung terhadap tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Di lain pihak, teknologi yang inovatif ternyata semakin murah, dengan kecanggihan yang terus meningkat menyebabkan UMKM diuntungkan, karena tidak dibebani biaya riset dan eksperimen.

Untuk mengejar ketertinggalan UMKM dalam penggunaan teknologi telah dilaksanakan berbagai program bantuan perkuatan antara lain melalui program Bantuan Sektor Usaha Selektif sebagai stimulan antara lain: Program pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan sistem Bank Padi dan Program pengembangan usaha penangkapan ikan yang antara lain melalui Promosi proyek UMKM, Modernisasi usaha ritel koperasi dan Pengembangan sarana pemasaran UMKM.

### 4. Pengembangan Pemasaran

Di masa mendatang dengan semakin terbukanya pasar, diperlukan langkah upaya penyusunan program pembangunan UMKM yang sifatnya lebih reformis, dengan dilengkapi sejumlah peraturan atau ketentuan yang dapat melindungi kehidupan UMKM dalam arti yang luas. Misalnya dalam hal perlunya ditetapkan dan dikembangkan program untuk mewujudkan “*pasar bebas yang berkeadilan*” secara konkrit di lapangan. Desain program pembangunannya diharapkan dapat disusun dengan orientasi untuk memicu tumbuh-kembangnya kelompok UMKM tertentu dengan melalui proses pengembangan kemandiriannya, sehingga mereka masing-masing dapat membangun kemampuannya karena terlibat secara langsung dengan kondisi yang ada. Langkah itu jelas akan dengan cepat dapat membantu mereka dalam memahami posisinya.

Kerangka pikir seperti di atas cukup kuat mendorong pemerintah menetapkan pembangunan UKM dengan memakai pendekatan pembangunan *sentra UKM* (yang produktif dengan orientasi ekspor atau paling tidak menghasilkan produk lokal yang berkualitas dan efisien), sebagai sarana (*entry point*) untuk saat ini dan masa mendatang. Tentu saja hal seperti itu, secara operasional akan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan atau alasan teknis serta mengacu pula pada berbagai contoh keberhasilan pengalaman negara lain. Sedang dari sisi alasan rasional ekonomis pendekatan sentra digunakan karena dapat membantu membangun, di antaranya berbagai kemudahan dalam melakukan proses pembinaan, langkah

akan lebih terfokus, dan diharapkan juga lebih efisien karena pelaksanaannya secara kolektif

Dalam membangun sistem pemasaran bagi UMKM, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian penting adalah ketersediaan informasi tentang pasar. Kurangnya informasi pasar selama ini diindikasikan dari sempitnya peluang pasar bagi sebagian besar produk UMKM dan ketidakpastian harga yang sangat merugikan kelompok marjinal tersebut. Dari sisi yang lain perkembangan era bisnis global menuntut inovasi dan kreatifitas para pelaku usaha, baik dari aspek teknologi maupun kualitas sumberdaya manusia, agar produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan permintaan pasar. Sekali lagi disini terlihat perlunya informasi pasar termasuk permintaan pasar dan selera pasar.

Ketidakmampuan UMKM untuk mendapatkan informasi pasar tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai kelemahan kondisi faktor internal UMKM, tetapi juga berkaitan dengan komitmen semua pihak untuk memberdayakan UMKM. Pengembangan sistem informasi untuk UMKM selama satu dekade terakhir ini memang sudah dilaksanakan baik oleh UMKM sendiri, Pemerintah dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam berbagai bentuk promosi produk UMKM. Keberhasilan kegiatan promosi yang dilaksanakan tersebut nampaknya masih sangat terbatas, hal ini antara lain diindikasikan dari pengetahuan konsumen tentang asal produk yang mereka beli.

Program promosi pemasaran produk UMKM pada intinya adalah ditujukan untuk memperkenalkan produk UMKM kepasar nasional dan internasional, dalam rangka mendorong peningkatan produksi UMKM. Kegiatan-kegiatan promosi pemasaran ini juga diharapkan sekaligus dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas, serta meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperbaiki kualitas teknologi dan manajemen usahanya. Dampak lebih lanjut yang diharapkan dari meningkatnya produk UMKM adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran.

#### **IV. Penutup**

Dengan memperhatikan berbagai aspek iklim usaha sekarang ini yang belum sepenuhnya mampu mendorong UMKM untuk lebih produktif, efisien, dan berdaya saing, nampaknya komitmen untuk memberdayakan ekonomi rakyat harus diarahkan menjadi konsensus nasional.

Ketidakmampuan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) untuk tumbuh dan berkembang dalam iklim usaha yang ada sekarang ini, memang sudah disadari sejak awal Pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perhatian pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM juga sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009. Untuk tujuan tersebut Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyusun Rencana Tindak Jangka Menengah Koperasi dan UKM yang diaplikasikan dalam berbagai program nyata antara lain ;

1. Penyederhanaan Perizinan dan pengembangan sistem perijinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha;
2. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan koperasi;
3. Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan koperasi, antara lain:
  - a. RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - b. RUU Perkoperasian
  - c. RUU Lembaga Keuangan Mikro
  - d. RUU Penjaminan Kredit
  - e. Peraturan Presiden (Perpres) tentang lembaga keuangan Mikro

Kondisi UMKM yang masih marjinal baik dalam berbagai aspek usahanya seperti diuraikan di atas nampaknya belum dapat diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan fisik dan permodalan melalui berbagai program. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Penciptaan iklim juga sekaligus diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada, seperti misalnya pemberian bantuan permodalan bagi UMKM secara disubstitusi, dengan perbaikan sub sistem keuangan/permodalan dalam sistem perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai regulasi kebijakan dibidang perbankan, namun hal ini tentu saja berimplikasi luas terhadap sistem perekonomian nasional. Untuk membatasi implikasi maupun dampak dari kebijakan yang diambil, maka dapat disarankan regulasi yang bersifat mikro hanya dikalangan UMKM saja, misalnya dengan program sertifikasi lahan, Program Modal Awal dan Padananan atau membangun bank koperasi. Bank yang dimaksud adalah bank untuk koperasi, atau bank yang khusus melayani UMKM (*bank for cooperative*) dan bukan bank milik koperasi (*cooperative Bank*).

Regulasi berbagai kebijakan yang dapat membawa iklim baru bagi pemberdayaan UMKM tentu saja bukan hal yang sederhana karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM menyangkut sangat banyak aspek dan sangat

banyak sektor. Oleh sebab itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara sendirian tidak akan mampu melaksanakan hal tersebut, maka yang menjadi kata kunci dalam mengaplikasikan wacana ini adalah membangun sistem koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik dari kelompok pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Sebagai kata awal dari pembentuk koordinasi ini adalah kesamaan persepsi tentang keperluan pemberdayaan UMKM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Departemen Koperasi, Ditjen Bina Lembaga Koperasi, Jakarta.
- Anonimous, (1995). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil*. Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta.
- Anonimous, (2000). *Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Pembiayaan Ekspor Bagi Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Pasar Luar Negeri*. Laporan Penelitian. Didukung oleh The Asia Foundation dan Swisscontact. Center for Economic and Social Studies. 2000
- Anonimous, (2001). *Policy Reform for Increasing Small and Medium*.
- Anonimous, (1999). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, dan Undang-undang nomor 3 tahun 2004, tentang Bank Indonesia*.
- Anonimous, (2002). *Strategi Pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah*. Jurnal Ekonomi UNTAR, Vol 7 nomor 1, Jakarta
- Anonimous, (2006). *Kajian Model Penumbuhan Unit Usaha Baru*. Deputi Pengkajian Sumberdaya UMKM. Jakarta
- Manggara Tambunan, (2004). *Melangkah Ke Depan Bersama UKM*. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 september 2004.
- Maulana Ibrahim, (2004). *Mendorong Peran UMKM Dalam Pertekonomian Indonesia di Masa Depan*. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 september 2004.
- Suryadarma Ali, (2007). *Kinerja UMKM Masih Lemah*. Harian Kompas Tanggal 26 Nopember 2006.
- M. Chatib Basri. *Program 100 Hari Pemerintahan SBY Kalla*. Analisis Ekonomi Kompas, 1 Nopember 2004. Jakarta.

Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UMKM (Saudin Sijabat)

Michael, H. Morris, Ramon A. Avila, Jeffrey Allen, (1993). “*Individualism and The Modern Corporation: Implications for Innovation and Entrepreneurship*”. *Journal of Management*, 19(3).

Khalid Nadvi, (1995). *Industrial Clusters and Networks: Case Studies of SME Growth and Innovation*. UNIDO.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM, (2003). *Seri Kebijakan: Pengembangan Sentra UKM, BDS dan MAP*, (2003). Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.

SME Cluster Development, Principle and Practices, (2004). UNIDO

Halomoan Tamba, Saudin Sijabat, Pedagang Kaki Lima: *Entrepreneur Yang Terabaikan*. Infokop No. 29 Tahun XXII 2006, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKK, Jakarta. <sup>1)</sup> Porsi Kredit UMKM Membesar, *Harian Kompas*, 30 April 2008